



Media: Radar

Hari: Minggu

Tanggal: 12 April 2020

Halaman: 1

Optimalkan Dana Desa Hadapi Korona

Pemanfaatan Dana Desa Harus Konfirmasi Kemenkeu dan Kemendagri

JOGJA, Radar Jogja – Penanganan pagebluk Covid-19 membutuhkan peran serta berbagai pihak. Baik dari rantai pemerintahan tertinggi hingga level terendah. Upaya merealisasi anggaran pun terus didorong, dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, sampai tingkat desa.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dimungkinkan untuk direalisasi. Ini sejalan dengan rencana Kementerian Keuangan untuk mengalihkan dana desa guna menangani dampak virus korona. "Yang penting bisa realokasi anggaran yang dimungkinkan dalam UU. Realokasi dimungkinkan karena desa punya APBD sendiri yang direalisasi," katanya.

Menurut HB X, desa dapat merealisasi anggaran hingga 20 persen. Sedangkan dana yang digelontorkan pada tiap desa mencapai Rp 800 juta hingga Rp 2 miliar. "Kalau sudah Rp 800 juta sudah bisa disisihkan 15-20 persen untuk bisa melakukan realokasi memberikan bantuan tunai," jelasnya.

Tak hanya dana desa, APBD provinsi dan kabupaten/kota pun juga menjalani skema yang sama. Dana realokasi difokuskan untuk membiayai sektor kesehatan, memberikan jaring-jaring sosial, hingga membantu pengusaha dan pelaku UMKM.

"Yang untuk pembangunan ya stop dulu, kalau tidak ada *dutnya*. Pokoknya yang prioritas dulu," kata HB X.

Saat disinggung apakah Dana Keistimewaan (Danais) yang jumlahnya mencapai Rp 1,3 triliun bisa dimanfaatkan untuk penanganan korona, HB X mengaku belum mengupayakannya. Menurutnya, Danais berbeda dengan APBD. Sehingga pihaknya perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Danais itu dana yang berbeda dengan APBD perlu juga kita konfirmasi kepada kementerian keuangan dan dalam negeri. Tapi kita belum melangkah ke situ," jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo menjelaskan, Kementerian Keuangan telah melakukan peninjauan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tiap daerah. Dalam waktu dekat bakal ada surat edaran terkait kepastian realokasi.

"Akan ada kepastian bahwa dana desa dan alokasi dana desa boleh digunakan untuk hal-hal itu (penanganan Covid-19). Alokasi dana desa bisa dipakai jaring pengaman sosial dan karantina mandiri di desa," tutur BWH sapaan akrabnya.

Menurutnya, penanganan dampak virus korona tak cukup jika hanya mengandalkan anggaran dari pusat. Sehingga dana dari daerah hingga desa harus dimanfaatkan secara optimal. BWH lantas mengapresiasi langkah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul yang berinisiatif melakukan upaya realokasi anggaran. "Harusnya bisa diikuti desa-desa yang lain. Nanti yang mengevaluasi pemkab, pemkot, dan gugus tugas," katanya.

BWH melanjutkan, Pemprov DIJ juga terus melakukan upaya realokasi APBD. Saat ini dana untuk penanganan korona adalah Rp 325 miliar. Sementara untuk APBD kabupaten/kota akan ditentukan dalam kurun waktu seminggu.

Akibat masa krisis ini, pendapatan asli daerah (PAD) DIJ diprediksi bakal menurun secara signifikan. BWH memprediksi angkanya menyentuh Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Sektor pariwisata dan proyek-proyek tutup. Retribusi yang lain macet. *Cashflow* kita rata-rata sehari Rp 4 miliar. "Sebulan pendapatannya Rp 100 miliar. Untuk belanja wajib butuh Rp 98 miliar per bulan. Belum untuk kepentingan yang lain," tandasnya. (tor/din/rg)

BANGKIT BERSAMA

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005